

GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas

Hari : Selasa

Subyek : Hutan

Tanggal : 04 Januari 2011

Hal : 12

KONSERVASI Sumut Minta Setengah Juta Hektar Hutan Dilepaskan

Medan, Kompas - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meminta Kementerian Kehutanan melepaskan setengah juta hektar kawasan hutan menjadi nonhutan. Alasannya, sebagian besar kawasan hutan tersebut telah berubah menjadi permukiman masyarakat hingga pusat pemerintahan.

Luas total kawasan hutan yang diminta untuk dilepaskan tersebut 564.200,36 hektar. Hingga kini permintaan tersebut belum disetujui Kementerian Kehutanan. Upaya pelepasan kawasan hutan menjadi nonhutan ini merupakan bagian dari revisi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2005 tentang penunjukan kawasan hutan di Sumatera Utara.

Berdasarkan SK tersebut, luas kawasan hutan di Sumut mencapai 3.742.120 hektar yang terdiri atas kawasan suaka alam 477.070 hektar, hutan lindung 1.297.330 hektar, hutan produksi terbatas 879.270 hektar, hutan produksi tetap 1.035.690 hektar, dan hutan produksi yang dikonversi 52.760 hektar.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumut James Budiman Siringoringo yang dihubungi dari Medan, Senin (3/1), mengatakan, permintaan revisi SK Menhut tersebut saat ini sudah masuk tahap verifikasi oleh tim terpadu dari lintas kementerian dan LIPI. "Tim terpadu sudah turun ke lapangan dan telah selesai memverifikasi apa yang kami minta. Tim terpadu akan mengadakan pertemuan di Jakarta menindaklanjuti temuan ini," ujar Siringoringo.

Siringoringo membantah jika pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, berkeberatan dengan permintaan untuk melepas lebih dari setengah juta kawasan hutan di Sumut menjadi nonhutan.

"Ini bukan soal keberatan atau tidak. Pelepasan kawasan hutan ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan, termasuk faktor sosial, karena pada kenyataannya kawasan yang kami usulkan untuk dilepaskan tersebut sudah banyak yang menjadi permukiman penduduk," kata Siringoringo. Siringoringo mengungkapkan, saking lamanya usulan tersebut direspons pemerintah, ada pemerintah kabupaten yang datang langsung ke Jakarta untuk menanyakan perkembangannya.

Tata ruang Sumut

Akibat belum diselesaikannya usulan revisi kawasan hutan di Sumut, perubahan rencana tata ruang dan wilayah provinsi juga belum dapat diselesaikan. Kepala Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara Mulyadi Simatupang menuturkan, rencana tata ruang dan wilayah Provinsi Sumut tak bisa ditetapkan menjadi peraturan daerah sebelum revisi kawasan hutan diselesaikan.

Menurut Mulyadi, keterlambatan penetapan peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah membuat sebagian proses pembangunan di Sumut stagnan. "Investor jelas tak mau terlibat pembangunan di daerah karena mereka butuh kepastian hukum atas status kawasan yang ingin mereka bangun," katanya.